

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Produksi Keripik Pisang Aneka Rasa di Desa Brambang

Darto, Farichatun Nisa', Hudallah

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Email: nisa.farichatun@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang merupakan sentra penghasil pisang yang berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah seperti keripik pisang aneka rasa. Pemerintah Desa Brambang mengambil langkah strategis melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 guna mendukung sektor industri rumah tangga dan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah pada implementasi kebijakan pemerintah desa serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha keripik pisang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan indikator model implementasi George C. Edwards III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pemerintah desa tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga memberikan pembinaan, dukungan anggaran, serta melibatkan kelompok rentan seperti penerima PKH dalam kegiatan produksi. Dampaknya terlihat dari meningkatnya pendapatan warga, terbukanya lapangan kerja baru, serta terbentuknya kesadaran kolektif dalam pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Namun demikian, kerja sama dengan pihak luar seperti dinas teknis atau lembaga keuangan masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan ke depan agar ekosistem usaha lokal dapat berkembang secara optimal.

Kata Kunci: Ekonomi Lokal, UMKM, Keripik Pisang, Desa Brambang

ABSTRACT

Local economic development has become a vital strategy to improve the welfare of rural communities, particularly by optimizing the potential of natural resources. Brambang Village, located in Diwek Sub-district, Jombang Regency, is a center of banana production with great potential to be processed into value-added products such as flavored banana chips. The village government of Brambang has taken strategic steps through policies outlined in Village Regulation Number 1 of 2020 to support the household industry sector and empower local MSMEs. This research adopts a descriptive qualitative approach, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The focus of the study is on the implementation of village government policies and their impact on the local economy, particularly for banana chips producers. The results show that the policy implementation aligns with the indicators of George C. Edwards III's implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The village government not only established regulations but also provided coaching, budgetary support, and involved vulnerable groups such as PKH recipients in production activities. The impact is reflected in increased community income, the creation of new job opportunities, and the emergence of collective awareness in developing a sustainable local economy. However, collaboration with external parties such as technical agencies and financial institutions remains in its early stages and needs to be strengthened to optimize the development of the local business ecosystem.

Keywords: Local Economy, MSMEs, Banana Chips, Brambang Village

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi lokal merupakan isu yang semakin mendominasi agenda pembangunan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, daerah-daerah di Indonesia dituntut untuk beradaptasi dan bersaing dalam tatanan ekonomi yang lebih luas. Pengembangan ekonomi lokal tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja (Purnomo, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9,03%, menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka tersebut mencerminkan perlunya langkah strategis yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu solusi potensial yang dapat dioptimalkan. Dengan memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa di Indonesia pada era sekarang tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik semata, melainkan juga diarahkan pada upaya memperkuat ekonomi lokal yang berakar pada potensi masyarakat. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil sekaligus basis kehidupan sosial-ekonomi, memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan warganya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Nurhayati & Abrar, 2021). Dalam menghadapi arus globalisasi dan dinamika persaingan pasar yang semakin ketat, pengembangan ekonomi lokal menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian desa, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. UMKM tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih khusus, Pemerintah

Kabupaten Jombang juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang mengatur mengenai kemudahan berusaha, perlindungan usaha, serta penguatan ekonomi lokal. Hal ini berarti terdapat komitmen nyata dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mendorong pemberdayaan UMKM sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Farizqiyah, 2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan akses permodalan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi daerah. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian desa berbasis ekonomi lokal.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Beragam jenis IKM tumbuh dan berkembang di daerah ini, mencerminkan kekayaan potensi lokal yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Industri-industri yang berkembang di Jombang meliputi sektor kerajinan, aneka makanan, serta tekstil, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Industri-industri ini tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah (Ariosanjoto, 2015). Keberadaan IKM di Jombang menjadi bukti nyata bahwa potensi lokal, jika dikelola dengan baik, mampu mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kekayaan sumber daya lokal dan kreativitas masyarakatnya tersebut, Kabupaten Jombang mampu menjadi salah satu pusat industri kecil dan menengah yang kompetitif di tingkat regional. Potensi ini perlu terus didukung melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan akses pasar oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang di definisikan oleh (Suryana, 2013) menyatakan bahwa pemerintah di tingkat lokal memiliki kapasitas untuk menciptakan kebijakan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sektor-sektor ekonomi lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri rumah tangga.

Desa Brambang, yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil pisang dengan kualitas unggul dan volume produksi yang melimpah. Potensi tersebut telah menjadi basis bagi berkembangnya usaha rumah tangga yang mengolah pisang menjadi keripik dengan berbagai varian rasa. Selama empat tahun terakhir, usaha keripik pisang di desa ini mengalami pertumbuhan pesat berkat dukungan aktif dari pemerintah desa. Dukungan tersebut mencakup penyediaan modal, pelatihan teknik pengolahan, serta pendampingan dalam strategi pemasaran (Affandi, 2023).

Selain hal tersebut, pemerintah desa melibatkan kelompok masyarakat penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam kegiatan produksi keripik pisang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan konsumtif dan mendorong kemandirian ekonomi. Dampak dari langkah ini cukup signifikan, yakni meningkatnya pendapatan rumah tangga, terciptanya lapangan kerja baru, perluasan pasar produk lokal, serta tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi desa (Wisnu, 2021). Meski begitu, usaha keripik pisang masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jaringan pemasaran, akses permodalan eksternal yang terbatas, serta minimnya kerja sama dengan dinas teknis maupun lembaga keuangan. Fakta empiris ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah desa benar-benar efektif dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui produksi keripik pisang.

Berdasarkan berbagai temuan dan penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan analisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa serta dampak produksi keripik pisang terhadap perekonomian masyarakat Desa Brambang. Dalam penelitian ini digunakan teori Edward III sebagai landasan analisis, mengingat teori tersebut relevan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan publik secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pembaruan dengan memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui produksi keripik pisang aneka rasa di Desa Brambang. Fokus ini dipilih karena adanya potensi sumber daya lokal yang khas sekaligus tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satu perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteks lokasi serta isu yang menjadi titik perhatian. Jika penelitian terdahulu lebih banyak

menyoroti implementasi kebijakan pada sektor umum atau wilayah lain, penelitian ini secara spesifik menelaah dinamika kebijakan pemerintah Desa Brambang dalam memanfaatkan potensi lokal berupa produksi keripik pisang sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan memahami fenomena implementasi kebijakan pemerintah desa secara mendalam berdasarkan data yang terkumpul di lapangan (Sugiyono, 2014). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis proses kebijakan, perilaku aktor, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang saling terkait sebagai unit analisis (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang dikenal sebagai sentra penghasil pisang dan memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal melalui produksi keripik pisang aneka rasa. Lokasi ini dipilih secara purposif karena menjadi desa yang secara aktif mengimplementasikan kebijakan pemerintah desa dalam mendorong industri rumah tangga berbasis potensi lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, pelaku usaha keripik pisang, penerima PKH yang dilibatkan dalam produksi, serta tokoh masyarakat, dan melalui dokumentasi berupa arsip peraturan desa, laporan kegiatan, dan profil desa (Sugiyono, 2014). Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis Miles, Huberman, & Saldaña (2014), melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memeriksa keabsahan data. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2016). Model ini dipadukan dengan konsep ekonomi lokal yang menekankan peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan desa (Tambunan, 2012), sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan bagaimana kebijakan desa tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dijalankan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Produksi Keripik Pisang

Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dikenal sebagai salah satu sentra penghasil pisang dengan kualitas unggul. Potensi ini mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan penguatan ekonomi lokal melalui industri rumah tangga berbasis olahan pisang, khususnya keripik pisang aneka rasa. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi Lokal, yang mengalokasikan dana khusus untuk mendukung produksi dan pemasaran produk lokal.

Dalam konteks implementasi kebijakan, teori Edwards III digunakan sebagai pisau analisis. Edwards (dalam Subarsono, 2016) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut dapat diamati dalam dinamika pengembangan usaha keripik pisang di Desa Brambang.

Komunikasi (Communication)

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2016), komunikasi merupakan fondasi utama implementasi kebijakan, yang mencakup kejelasan tujuan, konsistensi pesan, serta keterbukaan saluran informasi. Di Desa Brambang, komunikasi kebijakan terkait produksi keripik pisang dilakukan melalui forum formal desa, pendekatan informal (PKK, majelis taklim, kelompok tani), serta media yang mudah diakses seperti WhatsApp, pengumuman masjid, dan papan informasi.

Sosialisasi dilakukan rutin minimal sebulan sekali, dengan pola komunikasi dua arah: penyampaian informasi sekaligus diskusi terbuka. Hal ini membuat masyarakat merasa dilibatkan, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh masyarakat bahwa informasi sering disebarkan juga melalui jalur informal seperti warung kopi atau pengumuman salat Jumat.

Kekuatan komunikasi pemerintah desa terletak pada konsistensi pesan, yaitu menekankan bahwa program ini adalah strategi jangka panjang, bukan proyek sesaat. Namun, masih terdapat kendala minor terkait keterlambatan informasi teknis yang membuat sebagian warga, khususnya pelaku usaha pemula, kesulitan mengikuti kegiatan.

Jika dikaitkan dengan teori Edwards III, komunikasi di Desa Brambang telah memenuhi indikator kejelasan pesan, penggunaan saluran yang tepat, keterlibatan masyarakat, serta feedback terbuka. Meski demikian, peningkatan akurasi waktu penyampaian informasi masih diperlukan agar partisipasi lebih optimal. Secara keseluruhan, komunikasi kebijakan di Desa Brambang dapat dikategorikan efektif dan menjadi dasar yang kuat bagi implementasi aspek lain, yakni sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Sumber Daya (Resources)

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2016), sumber daya mencakup manusia, finansial, fisik, informasi, dan institusional yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Di Desa Brambang, dukungan sumber daya dalam program pengembangan produksi keripik pisang menunjukkan kemajuan, meski belum sepenuhnya optimal.

Pertama, sumber daya manusia. Pemerintah desa menyelenggarakan pelatihan intensif pada Februari 2025 dengan 15 pelaku usaha sebagai peserta. Materi meliputi teknik pengolahan higienis, diversifikasi rasa, pengemasan, hingga pemasaran. Pelatihan ini meningkatkan keterampilan warga, namun kebutuhan pelatihan lanjutan, terutama digitalisasi dan pemasaran modern, masih terasa.

Kedua, bantuan sarana produksi. Pemerintah desa menyalurkan bantuan alat produksi (kompor gas, penggorengan, saringan minyak, alat peniris, dan kemasan) senilai Rp2.000.000 per pelaku usaha. Bantuan ini efektif memperbaiki kualitas produksi, tetapi keterbatasan jumlah alat menjadi kendala untuk meningkatkan skala usaha secara kolektif.

Ketiga, permodalan dan fasilitas tambahan. Modal kerja tunai dan fasilitas bersama masih minim. Banyak pelaku usaha bergantung pada dana pribadi atau arisan, sementara rumah produksi dan gudang penyimpanan belum tersedia. Hal ini membatasi kapasitas produksi, terutama saat permintaan meningkat.

Keempat, bahan baku. Ketersediaan pisang sebagai bahan baku relatif melimpah dengan harga stabil, menjadi keunggulan utama bagi keberlanjutan usaha.

Jika dikaitkan dengan teori Edwards III dan pendekatan pengembangan ekonomi lokal (Tambunan, 2012), maka dukungan sumber daya di Desa Brambang

tergolong cukup namun belum optimal. SDM dan bahan baku relatif terjamin, sementara aspek permodalan, fasilitas kolektif, dan digitalisasi usaha masih menjadi tantangan strategis yang perlu diperkuat agar usaha keripik pisang mampu berkembang ke pasar lebih luas.

Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition)

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2016), disposisi pelaksana kebijakan mencakup pemahaman, komitmen, dan motivasi aktor dalam menjalankan kebijakan. Tanpa sikap positif, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal di lapangan.

Pertama, pemerintah desa. Kepala Desa Brambang menunjukkan komitmen tinggi dengan menekankan orientasi pemberdayaan, bukan sekadar bantuan sosial. Antusiasme ini ditunjukkan melalui pendampingan langsung, monitoring pasca-pelatihan, serta keterlibatan dalam promosi produk pada acara desa maupun pameran UMKM. Hal ini menegaskan adanya disposisi positif dan visi jangka panjang.

Kedua, pendamping desa dan perangkat teknis. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Pendamping aktif menyuarakan aspirasi warga dan membantu teknis produksi, meskipun konsistensi pasca-pelatihan masih kurang merata. Beberapa pelaku usaha mengaku kesulitan mencari saluran konsultasi setelah kegiatan pelatihan berakhir, menunjukkan perlunya sistem pendampingan yang lebih berkelanjutan.

Ketiga, masyarakat pelaku usaha. Transformasi sikap paling menonjol terlihat dari kelompok penerima bantuan sosial yang kini menjadi wirausaha produktif. Mereka tidak hanya termotivasi secara individu, tetapi juga mulai membangun kesadaran kolektif melalui gotong royong dan inovasi produk, bahkan mencoba pemasaran sederhana secara daring.

Jika dikaitkan dengan teori Edwards III, disposisi pelaksana di Desa Brambang memenuhi indikator keberhasilan:

- a) Komitmen pemerintah desa tinggi dengan pendekatan pemberdayaan.
- b) Keterlibatan pendamping positif, meski belum konsisten.
- c) Motivasi pelaku usaha sangat tinggi, terutama kelompok rentan.

d) Kesadaran kolektif mulai terbentuk melalui praktik gotong royong.

Sejalan dengan pandangan Tayeb (2001), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemauan dan rasa memiliki dari pelaksana. Kondisi di Desa Brambang menunjukkan disposisi yang proaktif, inklusif, dan transformatif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam sistem pendampingan jangka panjang.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2016), struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi yang menentukan koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Struktur yang jelas dan responsif mempercepat implementasi, sementara struktur yang kaku dan tumpang tindih dapat menghambat.

Pertama, struktur organisasi di tingkat desa. Pemerintah Desa Brambang membentuk tim kecil untuk mendukung UMKM, termasuk produksi keripik pisang, dengan melibatkan perangkat desa, pendamping PKH, kader pemberdayaan, dan perwakilan kelompok usaha. Struktur ini cukup fleksibel sehingga pengambilan keputusan relatif cepat, misalnya saat memenuhi permintaan mendadak dalam jumlah besar. Namun, sebagian warga belum memahami alur pelaporan di luar kegiatan terprogram, sehingga terjadi kebingungan dalam mengakses pendampingan teknis.

Kedua, administrasi dan koordinasi. Dokumentasi kegiatan masih terbatas, lebih banyak bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Kelemahan ini berpotensi menghambat desa saat membutuhkan rekam jejak administratif untuk mengakses bantuan eksternal atau kerja sama kelembagaan.

Ketiga, hubungan antarlembaga. Pemerintah desa mulai membangun kemitraan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDes, serta lembaga keuangan mikro, tetapi kerja sama masih bersifat awal. Fokus utama masih pada penguatan internal sebelum memperluas jejaring eksternal yang lebih kompleks.

Jika dibandingkan dengan teori Edwards III, struktur birokrasi di Desa Brambang memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan kedekatan emosional antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, kekurangan terlihat pada fungsi pelaporan yang belum merata, lemahnya dokumentasi administratif, serta koordinasi eksternal yang masih terbatas.

Sejalan dengan Rahmi dkk. (2024), struktur birokrasi yang efektif tidak hanya sederhana, tetapi juga memerlukan distribusi peran yang tegas, mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, serta koordinasi vertikal dan horizontal yang kuat. Oleh karena itu, penguatan birokrasi Desa Brambang perlu difokuskan pada: (1) sistem administrasi yang lebih rapi, (2) pendampingan teknis pasca-program, dan (3) perluasan jaringan kelembagaan eksternal untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Dampak Produksi Keripik Pisang terhadap Perekonomian Masyarakat

Program produksi keripik pisang aneka rasa di Desa Brambang bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal. Dampaknya dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Pertama, peningkatan pendapatan. Pelaku usaha, terutama ibu rumah tangga dan penerima bantuan sosial, memperoleh tambahan penghasilan rata-rata Rp1.200.000–Rp1.500.000 per bulan. Penghasilan ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta reinvestasi usaha. Hal ini sesuai dengan Helmsing (2001) dan Tambunan (2012) yang menekankan bahwa UMKM desa mampu menciptakan nilai tambah langsung dan fleksibel bagi keluarga.

Kedua, penciptaan lapangan kerja lokal. Industri rumahan keripik pisang menyerap tenaga kerja informal, baik tetap maupun paruh waktu, terutama perempuan, remaja putus sekolah, dan lansia produktif. Observasi menunjukkan setiap rumah produksi melibatkan 1–2 pekerja tambahan untuk pengirisan, penggorengan, hingga pengemasan, dengan upah harian Rp25.000–Rp50.000. Skema kerja berbasis gotong royong ini sesuai karakter masyarakat desa dan memperkuat solidaritas sosial (Tambunan, 2012).

Ketiga, kemandirian ekonomi dan pemberdayaan sosial. Meski belum ada penerima PKH yang resmi keluar dari program bantuan, mereka mulai menunjukkan kemandirian parsial melalui aktivitas produksi, pendapatan tambahan, serta kepercayaan diri yang meningkat. Beberapa bahkan membentuk kelompok usaha dan melakukan pemasaran sederhana melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan (Syahrudin, 2019) bahwa pemberdayaan merupakan proses bertahap menuju kemandirian, bukan hasil instan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, kebijakan pemerintah Desa Brambang dalam mengembangkan produksi keripik pisang memberikan dampak positif yang nyata: meningkatkan pendapatan rumah tangga, membuka peluang kerja lokal, serta mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis potensi lokal dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Pemerintah Desa Brambang dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui produksi keripik pisang aneka rasa menunjukkan hasil yang positif. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti penerima bantuan sosial, untuk lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Dukungan dalam bentuk pelatihan, penyediaan alat produksi, serta pendampingan teknis telah mendorong peningkatan keterampilan pelaku usaha dan kualitas produk. Dampak nyata yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja baru, serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya pemberdayaan berbasis potensi lokal. Meskipun masih terdapat kendala pada aspek permodalan, pemasaran, dan kelembagaan, program ini membuktikan bahwa kebijakan berbasis potensi desa mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis menuju kemandirian desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku usaha keripik pisang, perangkat desa, serta masyarakat Desa Brambang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pengalaman berharga selama proses penelitian berlangsung. Tidak lupa penulis menghargai dukungan dari pihak akademisi dan rekan-rekan sejawat yang turut memberikan masukan, diskusi, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Affandi, A. A. (2023, Februari 6). Selain Salak, Diwek Juga Penghasil Buah Pisang. Diakses dari <https://jombang.jatimnetwork.com/ragam/pr-7427383693/selain-salak-diwek-juga-penghasil-buah-pisang-terbanyak-di-jombang-2-kecamatan-malah-habis>
- Ariosanjoto, C. (2015). Pemberdayaan Produk Ukm (Studi Deskriptif Tentang Upaya Pemberdayaan Produk Ukm Melalui Program Sertifikasi Hak Paten Merek/Legalitas Brand Yang Dilakukan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya Untuk Menghadapi Era-Afta 2015) (Tesis, Universitas Airlangga).
- Badan Pusat Statistik. (2024, September 18). Selamat Hari UMKM Nasional. Diakses dari <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm>
- Farizqiyah, H. (2024). Pengembangan UMKM Sebagai Basis Ekonomi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–68.
- Nurhayati, L., & Abrar, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Dalam Peningkatan Ekonomi Lokal Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 101–112.
- Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. *Ziyad Visi Media*.
- Rahmi, Y., Latifannisa, N., Wardiman, J., Yulhendri, Y., Cerya, E., & Nofriansyah, N. (2024). Struktur organisasi dan efektivitas manajemen koperasi pembangunan usaha Sumatera Barat. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 433–444.
- Rusandi, E., & Rusli, R. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Media Press.
- Subarsono. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Y. (2013). *Pembangunan Ekonomi Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Tambunan, T. (2012). *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wisnu. (2021, Oktober 18). Aktif Kegiatan Sosial di Desa, Nur Rochmah Dipercaya Warga Menjadi Kades Brambang. *Megapos*. Diakses dari <https://megapos.co.id/2021/10/18/aktif-kegiatan-sosial-di-desa-nur-rochmah-dipercaya-warga-menjadi-kades-brambang>